

Manajemen Utang Luar Negeri Dan Penghematan Anggaran Negara

Oleh: Ketua DPR RI, Marzuki Alie



Bank Indonesia (BI) baru-baru ini telah mengingatkan Pemerintah untuk mencermati utang LN Indonesia, khususnya utang LN Pemerintah, baik jangka pendek maupun jangka panjang (short and long term). Manajemen utang, khususnya utang LN sangat berkaitan dengan manajemen anggaran negara (APBN). Semakin besar defisit APBN, maka semakin besar kebutuhan anggaran untuk menutupi defisit, yang sebagian besar diperoleh dari utang domestik dan utang LN. Setiap kali Pemerintah merencanakan anggaran defisit, maka Pemerintah akan segera menerbitkan surat utang (Surat Perbendaharaan Negara dan Surat Berharga Negara), serta mencairkan pinjaman LN dari donor setiap tahun kecuali terdapat Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang defisit anggaran. Sementara Menteri Keuangan telah berfikir untuk menggunakan Pos SAL yang

disimpan dalam Tabungan Pemerintah sebesar Rp. 35,5 triliun untuk mengurangi defisit anggaran tersebut, dengan maksud untuk menghindari pinjaman baru.

APBN-P telah disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi UU, dimana Pendapatan Negara dan Hibah disepakati menjadi sebesar Rp. 1.169,9 triliun, terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp. 1.165,2 triliun dan hibah sebesar Rp. 4,6 triliun. Sementara Belanja Negara ditetapkan menjadi Rp. 1.320,7 triliun dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 908,2 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp. 412,5 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran menjadi 2,1% (Rp. 150,8 triliun) dari PDB.

Perlu dipahami bahwa pembiayaan defisit APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang juga dilakukan negara lain. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, bagaimana memperkecil defisit anggaran setiap tahun. Karena instrumen utama dan terbesar untuk menutupi defisit adalah dari utang (deficit financing).

Utang Warisan

Kebijakan utang LN telah ada sejak masa Orde Lama. Tetapi pembengkakan utang, khususnya utang LN terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru berkuasa. Pada saat itu mungkin tidak terpikirkan bahwa dampak utang LN akan terus membebani dan mengengerus anggaran negara sampai saat ini. Akibatnya alokasi anggaran untuk belanja pembangunan semakin minim.

Jumlah utang LN semakin bertambah, saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998, dimana negara harus terbebani dengan membengkaknya jumlah utang terutama disebabkan depresiasi rupiah terhadap kurs dollar, AS. Kondisi ini ikut menyumbang keterpurukan anggaran negara dengan defisit yang semakin besar. Belum lagi beban pembayaran bunga utang LN setiap tahun (interest payment).

Utang yang jatuh tempo pada tahun 2009, misalnya, hampir 3 kali lipat lebih besar dari utang LN yang jatuh tempo tahun 2008 sebesar US\$ 2,894 miliar. Pemerintah harus membayar utang LN jatuh tempo tahun depan US\$ 6,514 miliar. Yang menjadi catatan positif adalah utang LN yang

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/be-rita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KE-TUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Helmizar **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIM-PINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **FOTOGRAFER:** Eka Hindra **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindy **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

jatuh tempo tahun 2010 turun menjadi US\$ 5,215 miliar.

Total utang pemerintah hingga Juni 2011 mencapai Rp1,894 triliun (USD 118,6 Miliar) atau naik Rp127 triliun dari akhir 2010 yang sebesar Rp1,677 triliun. Nominal utang bertambah karena penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Sementara penambahan dari utang LN relatif stabil. Sedangkan tahun 2012 penambahan utang LN diperkirakan sebesar US\$ 4,516 miliar, tahun 2013 US\$ 4,562 miliar, tahun 2014 sebesar US\$ 4,371 miliar. Pinjaman utang LN ini akan jatuh tempo tiap tahunnya hingga tahun 2040.

Rasio Utang Terhadap PDB

Rasio utang terhadap PDB merupakan salah satu indikator dari kondisi perekonomian suatu negara, khususnya kondisi keuangan negara-nya. Rasio utang terhadap PDB saat ini adalah 28,2%. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan masa krisis tahun 1998 yang mencapai 151,2% dari PDB. Pemerintah telah memprediksi, rasio utang terhadap PDB sebesar 25% pada pertengahan 2011. Pemerintah memang telah berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB, namun upaya mengurangi resiko utang LN harus terus dilakukan, baik Pemerintah maupun swasta. Penurunan rasio merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat dunia.

Presiden menyerukan agar seluruh kementerian menghemat anggaran belanja dalam APBN 2011 untuk memperkecil defisit anggaran negara, khususnya penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran pada kementerian/ lembaga/pemerintah daerah harus berfikir bagaimana cara

melakukan penghematan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun 2011. Penghematan yang bisa dilakukan misalnya, mengurangi frekwensi perjalanan dinas, baik dalam perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri yang tidak perlu dan tidak mendesak, mengurangi acara seminar, sosialisasi dan rapat-rapat dinas di luar kota dengan menggunakan hotel mewah dan sebagainya. Khusus untuk penggunaan belanja modal, agar dilakukan penghematan dengan mengkaji kembali hal-hal yang tidak perlu dan kurang bermanfaat, serta melakukan evaluasi atas standar berbagai jenis kegiatan, barang dan jasa yang dapat ditugaskan kepada kementerian terkait untuk menutup ruang terjadinya penyimpangan oleh siapapun yang bertanggungjawab atas program tersebut. Dilain pihak, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pada kementerian/ lembaga/pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Sehingga, mempersempit ruang gerak untuk melakukan penyelewengan.

Presiden juga sudah sering mengingatkan jajaran kementerian untuk benar-benar menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dan meningkatkan keamanan anggaran negara (safety). Presiden mengatakan, jika Pemerintah menaikkan defisit 0,4%, maka sama dengan menambah pinjaman baru sebesar Rp. 28 Triliun. Penghematan pengeluaran negara yang tidak perlu, justru akan memperkecil penerbitan Surat Utang dan menunda pencairan pinjaman LN. Sudah saatnya Pemerintah benar-benar menyikapi permasalahan defisit anggaran dan mencari alternatif solusi yang membuat aman keuangan negara, khususnya APBN.*



Komisi VII Menilai Verifikasi Ijin Usaha Pertambangan di Kalbar Belum Sinkron

Berdasarkan paparan beberapa perusahaan pertambangan di Kalimantan Barat, Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat menilai Verifikasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai saat ini belum sinkron.



Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat, Teuku Riefky (kiri)

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR RI yang juga Ketua Komisi VII DPR RI Teuku Riefky Harsya saat pertemuan dengan beberapa perusahaan pertambangan yang memiliki IUP di Pontianak, beberapa waktu lalu.

Riefky menjelaskan bahwa UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara Indonesia ke depan, termasuk dalam hal pengaturan Domestic Market Obligation (DMO), kebijakan produksi mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah pertambangan, serta pertambangan yang baik dan benar.

“UU Minerba mewajibkan registrasi ulang bagi semua ijin tambang yang dikeluarkan Bupati-bupati, dan berdasarkan data dari Dirjen Minerba ijin yang dikeluarkan para bupati tidak sama dengan daftar di pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Minerba,”

terang Riefky.

Jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati/Walikota yang mengeluarkan ijin-ijin pertambangan itu sudah menyalahi prosedur.

Sementara Asfihani Anggota Tim Kunker Komisi VII DPR RI (F-Demokrat) menjelaskan bahwa dari pertemuan tersebut menemukan salah satu perusahaan yang mendapatkan ijin usaha pertambangan eksploitasi ternyata perusahaan tersebut masih melakukan eksplorasi. “Inikan kebalik, harusnya prosesnya dalam perijinan dari visibilitas tadi eksplorasi baru ijin produksi,” paparnya.

“Ini akan kita tertibkan, dan ini baru salah satu contoh yang ada di Kalbar. Kita yakin yang 10.000 ijin yang telah dikeluarkan pemerintah daerah itu mungkin kebanyakan seperti ini. Karena dia hanya mengejar ijin keluar. Ijin ini juga belum tentu dia gunakan untuk melakukan kegiatan di lapangan bisa juga untuk kepentingan

IPO,” tambah Asfihani.

“Melihat kenyataan ini, Komisi VII DPR RI akan melakukan evaluasi berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dari pemilik tambang dalam rangka melaksanakan UU Nomor 4/2009.” Katanya.

Sedangkan mengenai tumpang tindih ijin, Asfihani menjelaskan bahwa yang menjadi persoalan adalah adanya tumpang tindih berkaitan dengan ijin dengan ijin. Misalnya di satu areal ada ijin PKP2B dan ijin KP, tapi kemudian dikeluarkan lagi ijin yang sama.

“Hal ini yang harus disikapi, artinya bahwa pemerintah pusat tidak dapat melegalkan atau memverifikasi ijin yang terakhir/belakangan,” imbuh Asfihani.

Jika tumpang tindih berkaitan dengan kegiatan perkebunan dan sebagainya bisa diselesaikan dengan cara B to B, artinya si pemilik lahan yang di atasnya itu ada kegiatan kebun dengan syarat ijin pertambangan lebih dulu diterbitkan, maka tentunya yang menanam di atas kegiatan tambang itu harus legowo untuk menegosiasikan lahannya itu untuk bisa dijadikan areal tambang.

Perusahaan pertambangan yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain PT. Alam Sambas Sejahtera, PT. Alu Sentosa, PT. Dinamika Sejahtera Mandiri, PT. Mega Citra Utama, PT. Persada Pratama Cemerlang, dan PT. Citra Mineral Investindo.

Dalam pertemuan, perusahaan pertambangan yang hadir tersebut menyampaikan keluhan tidak adanya sosialisasi yang baik, sehingga persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Dirjen Minerba tidak bisa dilakukan secara optimal. (sc) foto:sc/parle

Komisi VII Minta DSLNG Perhatikan Program CSR

Hal tersebut disampaikan oleh anggota tim kunjungan kerja komisi VII, Idris Lutfi (F-PKS) saat Tim Kunjungan Kerja Komisi VII melakukan Kunjungan Lapangan ke areal Proyek DSLNG, Banggai, Selasa (26/7).

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke Sulawesi Tengah sangat menginginkan perhatian yang lebih dari pihak Donggi Senoro L&G mengenai program Corporate Social Responsibility (CSR) proyek DSLNG, karena menurutnya program tersebut dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.



Komisi VII DPR RI saat berkunjung ke DSLNG dan mendengarkan pemaparan program CSR

“Kami menginginkan agar program-program CSR dibuat lebih banyak dan bervariasi demi kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pemasangan listrik di daerah-daerah yang belum tersentuh listrik, pembangunan sarana ibadah, pembangunan tempat pendidikan, pembangunan sarana kesehatan, dan pembangunan sarana umum lainnya,” jelas Idris.

Ahmad Rilyadi (F-PKS) yang biasa disapa Irel mengatakan, selain sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat dibangun, tetapi perlu juga keterlibatan masyarakat dalam proyek DSLNG ini. “Jadi seperti dibuat proses rekrutmen pegawai dan sebelum diterjunkan langsung ke lapangan, sebaiknya diberi pelatihan-pelatihan khu-

rus terlebih dahulu, agar masyarakat sekitar merasa ikut dilibatkan dalam proyek DSLNG ini, sehingga masyarakat tidak merasa dilupakan maupun ditinggalkan,” tegasnya.

“Proyek DSLNG ini kan baru akan beroperasi sekitar tahun 2014, sehingga mulai sekarang dicari bibit-bibit yang baik, yang dipilih dari masyarakat sekitar, lalu untuk diberi pelatihan, sehingga nanti pada awal tahun 2014, mereka sudah siap terjun,” jelas Irel.

Menanggapi hal tersebut, pihak DSLNG mengatakan bahwa pihaknya sedang mengusulkan pembangunan politeknik yang saat ini prosesnya sudah sampai di Dinas Pendidikan, dan mereka yakin, tidak lama lagi sarana pendidikan tersebut akan segera terwujud. (ra) foto:ra



Komisi X Terima Aspirasi Pemuda dan Pengurus Cabang Olah Raga di Aceh

Kesulitan anggaran menjadi tantangan utama kemajuan olah raga di provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD).



Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI ke Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Utut Adianto

Hal ini terungkap dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Pengurus Daerah Cabang Olahraga dan Pengurus DPD KNPI NAD, Kwarda Gerakan Pramuda di Gedung Pemuda, Banda Aceh, Senin (25/7).

“Dari aspirasi yang saya dengar ada kecenderungan masalah utama adalah dana ya. Ini tentu jadi perhatian dari Badan Anggaran DPR yang juga hadir dalam pertemuan kita ini,” kata Ketua Kunker Komisi X Utut Adianto sambil memperkenalkan anggota Banggar, Nurodji dari FP Gerindra.

Bagi Utut yang juga pernah bergelut dengan olah raga catur ini pendanaan menjadi faktor penting dalam kemajuan satu cabang olah raga. Ia meminta Dinas Pemuda dan Olahraga fokus memperhatikan permasalahan ini. Master Internasional catur ini mengungkapkan pada APBN 2011 NAD memperoleh anggaran untuk program olah raga sekitar 2,5 milyar rupiah sedangkan untuk kepemudaan 2,8 milyar rupiah lebih.

Sebelumnya Nurhayati, Ketua Pengda Perwosi (Persatuan Wanita Olah Raga) mengeluhkan minimnya

dukungan dana bagi organisasi yang dipimpinnya. “Kami mencari dana sendiri,” ujarnya. Perwosi Aceh tampaknya cukup aktif mengikuti kegiatan olah raga wanita sampai tingkat nasional. Ia berharap pemerintah tidak mengabaikan wanita yang mempunyai posisi strategis termasuk dalam mendukung kinerja pria.

Sementara itu Hamdanil, Ketua National Paralympic Commite melaporkan kemajuan olah raga para penyandang cacat di Aceh cukup signifikan. Sampai saat ini sudah 11 cabang yang telah ditekuni oleh para atletnya. “Selama ini belum ada dukungan terhadap kami, apa karena kami cacat?” tanya Hamdanil.

Anggota Komisi X Itet Tridjajati Sumariyanto memina Dinas Pora lebih kreatif dan jangan hanya terpaku pada pengembangan olah raga prestasi. Menurutnya perlu pula memberi perhatian pada olah raga sebagai sarana pendidikan dan rekreasi. Pemprov dapat mengembangkan keunikan lokal yang tidak kalah menarik bahkan berpotensi menjadi daya tarik bagi wisatawan.

“Dulu dengan alat-alat sederhana kita masih bisa berprestasi. Kenapa ti-

dak mencoba mengembangkan lomba lari di sawah, lomba berenang melawan arus di sungai, lomba memanjat pohon kelapa. Ini lomba menarik yang tidak ada dibagian lain di dunia, ini akan menarik wisatawan datang ke Aceh,” kata politisi PDIP ini dengan bersemangat.

Komisi X Dukung Satu KNPI

Ketua DPD KNPI Aceh, Ihsanuddin mempertanyakan berlarut-larutnya masalah dualisme kepengurusan ditubuh organisasi kepemudaan ini. Kondisi yang menurutnya berdampak pada belum adanya program nyata organisasi ditingkat nasional yang dapat menopang pembentukan karakter pemuda. Ia berharap DPR berperan mencari solusi masalah ini. “Kalau kami di Aceh hanya ada satu KNPI mulai dari tingkat kabupaten sampai kecamatan. Di Jakarta biar ada dualisme, tapi kami disini tetap satu,” tandasnya.

Menjawab hal ini anggota Komisi X, Muslim menjelaskan permasalahan KNPI sudah pernah dibicarakan dalam rapat kerja dengan Menpora Andi Malarangeng. Dari beberapa pertemuan dengan pihak terkait menpora menyatakan titik temu bagi hadirnya satu KNPI sudah semakin dekat. “Pak Menteri berjanji bulan Oktober sebagai bukannya pemuda masalah dualisme ini bisa selesai,” paparnya.

Politisi dari Partai Demokrat ini berharap KNPI sebagai wadah organisasi kepemudaan tetap bisa netral dan tidak menjadi bagian dari kepentingan politik tertentu. Ia menambahkan Komisi X akan membantu mengupayakan agar pada tahun anggaran selanjutnya organisasi yang tersebar diseluruh provinsi ini mendapat dukungan dana dari APBN. Dalam catatannya pasca reformasi tahun 1999 lalu, KNPI tidak pernah lagi mendapat dukungan anggaran yang memadai.(iky) foto:iky

Pemprov Banten Diminta Prioritaskan Pembangunan Fisik

Komisi X DPR melihat bangunan gedung di beberapa sekolah di kabupaten ini kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan dikhawatirkan ambruknya gedung sekolah tersebut dapat menimbulkan korban jiwa.

Keprihatinan ini disampaikan Tim kunjungan kerja Komisi X DPR saat meninjau beberapa sekolah di Pandeglang, Selasa (26/7) mulai dari sekolah yang kondisinya baik hingga sekolah yang atap bangunannya sudah roboh.

Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar meninjau beberapa sekolah yakni SD Negeri 1 Kadu Gemblo, SMP Negeri 3, SMK Negeri 2 dan Rintisan Sekolah Berstandart Internasional (RSBI) Cahaya Madani Boarding School, yang semuanya berlokasi di Pandeglang.

Ketika meninjau langsung kondisi SD Negeri 1 Kadugemblo, Tim Komisi X DPR melihat sendiri bangunan SD yang telah ambruk, sehingga murid-murid tersebut diungsikan ke tempat lain agar proses belajar mengajar tetap dapat berjalan seperti biasa.

Robohnya bangunan-bangunan sekolah tersebut ironisnya bukan disebabkan karena bencana alam, tetapi karena konstruksi bangunannya yang jelek.

Melihat banyaknya bangunan SD yang rusak berat, Rully meminta pemerintah daerah menyampaikan data riil kondisi bangunan dan fasilitas sekolah, baik yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.

"Kalau ada data lengkap, kami Komisi X bisa memperjuangkan agar pemerintah pusat mengalokasikan bantuan untuk perbaikan bangunan sekolah yang rusak dan pembangunan SMA/ sederajat yang masih kurang," katanya.

Ia juga menjelaskan, dalam dana alokasi khusus (DAK) pendidikan 2011, sebagian besar anggaran atau 65 persen untuk pembangunan/perbaikan fisik.

"Nilai DAK 2011 mencapai Rp 11

Komisi X DPR RI meminta Provinsi Banten untuk lebih memprioritaskan pembangunan fisik gedung-gedung sekolah khususnya sekolah SD yang ada di beberapa kabupaten di Provinsi Banten.



Tim Komisi X DPR RI berkunjung ke gedung-gedung sekolah di Provinsi Banten

triliun, dengan pembagian 80 persen untuk sekolah dasar dan 20 persen bagi sekolah menengah pertama, dan formulasinya 65 persen fisik dan 35 persen non fisik," kata Rully.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Abdul Azis menjelaskan, di daerah ini terdapat 880 SD, 134 SMP, 34 SMK dan 28 SMA yang tersebar di 35 kecamatan.

"Dari 880 SD tersebut, kurang lebih 200 bangunan SD mengalami rusak berat, belum lagi bangunan yang rusak ringan ratusan jumlahnya," kata Azis.

Jika ditotal, bangunan SD yang me-

ngalami kerusakan hampir mencapai 50 persen, SLTP yang mengalami kerusakan 29 persen dan SMA 14 persen.

Azis menambahkan, Kabupaten Pandeglang memang sangat kurang ruang kelas untuk SMA/ sederajat. Padahal tingkat animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SLTA sangat tinggi.

Kondisi inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah, dan dia berharap dengan melihat kondisi riil di lapangan, Komisi X DPR dapat memperjuangkan anggaran baik untuk perbaikan fisik maupun untuk penambahan ruang kelas. (tt) foto:tt

Komisi I DPR RI Komunikasi Dan Informasi Maluku Utara Memprihatinkan

Komisi I DPR RI saat melakukan Kunjungan Kerja di Provinsi Maluku Utara menemukan kondisi sangat memprihatinkan pada bidang komunikasi dan informasi. Kondisinya TVRI hanya mampu relay, peralatan rusak berat dan jangkauan RRI sangat terbatas, serta KPID belum terbentuk.

“Rakyat berhak menikmati layanan komunikasi dan informasi publik, maka Pemerintah Pusat dan daerah harus bertanggungjawab untuk percepatan pembangunan bidang komunikasi dan informasi,” tegas pimpinan Kunker Komisi I TB. Hasanuddin, Senin (25/7) di RRI Malut.

Telah 12 tahun sejak dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, seharusnya Maluku Utara yang merupakan daerah sebagai wilayah provinsi selayaknya memiliki perangkat-perangkat informasi publik. Namun Komisi DPR RI yang membidangi Komunikasi dan Informasi menemukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah belum terbentuk. Selain itu, TVRI Maluku Utara belum memiliki stasiun permanen, hanya memiliki 1 pemancar relay dengan 3 karyawan.

Selanjutnya, Komisi I DPR RI juga diperlihatkan dengan kondisi peralatan yang dimiliki RRI dalam keadaan lebih dari 50% rusak berat, ditambah lagi jangkauannya hanya memiliki 100 watt yang hanya berkemampuan 3 kilometer. Ironisnya swasta mampu 3000 watt. “Tidak habis pikir negara kalah dengan swasta, bukan dalam urusan duit tetapi urusan kebijakan,” keluh TB. Hasanuddin.

Dia menegaskan demi kepentingan publik, rakyat harus selalu mendapatkan informasi bahwa negara ini masih ada dan negara ini masih berdiri, kemudian memiliki tugas penyelenggaraan, dan rakyat juga harus ikut memelihara dan menikmati siaran negara yang bernama RRI dan TVRI, tetapi mengapa kita lalai. “Seluruh elemen pemerintah pusat harus bertanggung jawab dan pemerintah daerah juga harus berkomunikatif untuk menyinkapinya,” kata TB.



Pimpinan Kunker Komisi I DPR RI Ke Provinsi Maluku Utara, TB. Hasanuddin

Padahal kondisi geografis daerah Maluku Utara merupakan berbukit dan berpulau-pulau, dengan Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,32 km². Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan, dan jumlah pulau sebanyak 1.474. “Seharusnya tidak ada celah kosong, seluruhpenjuru maluku utara hingga seluruh pulau yang ada

dapat menikmatinya informasi. Dan itu adalah hak dari rakyat dan bangsa. pemerintah daerah dan pusat harus bertanggung jawab,” tegas TB. Hasanuddin.

Komisi I sangat mendukung percepatan pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi, seluruh temuan di Provinsi Maluku Utara akan segera dibahas dan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Menteri komunikasi dan Informatika, di Jakarta. (as)foto:as

Komisi VII Pertanyakan Kondisi Pertambangan Kalbar Pasca UU Minerba

Hal tersebut disampaikan saat pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Teuku Riefki Harsya dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis, di Pontianak beberapa waktu lalu.

Anggota Tim Kunker dari Fraksi Partai Golkar Satya W. Yudha mempertanyakan hambatan apa yang terjadi pasca disyahkannya UU Minerba.

“Peraturan baru UU Minerba mewajibkan adanya registrasi bagi semua perijinan yang dikeluarkan Bupati-bupati menjadi IUP, apa hambatannya karena ada dateline yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Minerba, di beberapa tempat menyatakan waktunya sangat mendesak, padahal yang tidak terregistrasi akan dinyatakan sebagai ilegal,” papar Satya.

Senada dengan Satya, Anggota Tim Kunker Komisi VII Dito Ganinduto menyatakan UU Minerba semangatnya adalah menertibkan IUP sehingga tidak terjadi tumpang tindih lahan pertambangan. “Apakah ada informasi kondisi pertambangan pasca UU Minerba yang baru?” tanya Dito.

Alimin Abdullah Anggota Tim Kunker dari Fraksi PAN menerangkan bahwa berdasarkan informasi dari beberapa daerah lain, bahwa KP yang dikeluarkan Kabupaten tidak sama dengan yang terdaftar di Dirjen Minerba, hal ini akibat dari tumpang tindih ijin pertambangan yang belum dilaporkan. “Kalau memang itu terjadi disini mohon segera dilaporkan,” kata Alimin.

Sedangkan Asfihani Anggota Tim Kunker dari Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan permasalahan yang terjadi di pertambangan Kalbar dan mempertanyakan

Sejumlah Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI (Tim Kunker) ke Provinsi Kalimantan Barat mempertanyakan kondisi usaha pertambangan di Kalimantan Barat pasca disyahkannya UU Mineral dan Batubara (UU Minerba).

kepatuhan pengusaha pertambangan terhadap pengelolaan lingkungan.

“Kegiatan pertambangan sudah pasti mengakibatkan kerusakan lingkungan. Jika lahan pertambangan tidak dikelola dengan baik, anak cucu kita yang akan mengalami dampak buruknya. Apa semua pengusaha tambang taat pada pengelolaan lingkungannya,” tanyanya.

Menjawab pertanyaan tersebut Gubernur Kalbar Cornelis menyatakan semua ijin-ijin tambang dikeluarkan oleh Bupati sebagai kepala daerah dan masih banyak terjadi kegiatan pertambangan tanpa ijin karena di beberapa daerah usaha pertambangan rakyat sudah menjadi mata pencaharian rakyat setempat.

“Kegiatan usaha pertambangan akan selalu mengakibatkan dampak lingkungan karena untuk memproduksi galian tambang harus membuka permukaan tanah. Belum semua pe-

megang IUP menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan,” terang Cornelis.

Walaupun demikian terhadap masalah tersebut Cornelis memaparkan bahwa sudah dilakukan upaya-upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi dalam proses penerbitan IUP, secara berkala melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan usaha pertambangan, memberikan teguran peringatan kepada pemegang IUP yang kegiatannya belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian serta pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan penertiban IUP, rekonsiliasi data bagi hasil PNPB ke kabupaten/kota pemerintah pusat, melakukan evaluasi IUP dan menampung permasalahan yang dihadapi pihak perusahaan. (sc) foto:sc/parle



Ketua Komisi VII DPR RI Teuku Riefky memberikan cinderamata dari DPR untuk Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis.

PHRI Diminta Bantu Promosikan Kerajinan Baduy

Komisi X DPR RI meminta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan pelaku wisata lainnya di Provinsi Banten untuk membantu mempromosikan hasil kerajinan suku Baduy.

Permintaan Ini disampaikan Komisi X DPR saat melakukan kunjungan kerja di perkampungan suku Baduy Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Rabu (27/7) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar.

“Kami Komisi X pun siap membantu pelaku usaha suku Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak dengan memasarkan produk aneka kerajinan Baduy di galeri-galeri yang ada di Jakarta untuk meningkatkan kemajuan produksi

kerajinan suku Baduy,” kata Rully.

Menurut dia, produk kerajinan suku Baduy cukup bagus karena dikerjakan secara tradisional juga menggunakan bahan alami dari hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu juga memiliki nilai jual tinggi, namun mereka kesulitan untuk memasarkan produk tersebut.

Karena itu, katanya, pihaknya meminta pemerintah dapat memberikan bantuan berupa penguatan modal maupun peningkatan produksi. Saat ini, pelaku usaha Baduy dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) perlu mendapat dorongan untuk memasarkannya. “Saya sangat tertarik aneka kerajinan Baduy, karena bahan bakunya dibuat dari bahan alami,” katanya.

Menurutnya, banyak kerajinan suku Baduy yang memiliki nilai jual di antaranya kain tenun, ikat kepala lommar, sampung, golok, tas koja, minu-

man madu, dan pernak-pernik. Tapi dia berharap, hendaknya pengrajin Baduy terus berkreasi dan berkarya untuk mengembangkan usahanya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. “Saya yakin ke depan pelaku usaha Baduy bisa berkembang,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Lurah yang biasa disebut Djaro Desa Kanekes Dainah mengatakan, masyarakat Baduy selama ini menggantungkan hidupnya dari pertanian dan sebagai pengrajin.

“Kami masyarakat Baduy tidak ada pengangguran, tapi juga tidak ada yang kaya,” kata Dainah. Tapi walaupun tidak ada yang kaya, masyarakat Baduy tidak ada yang kelaparan, mereka tetap dapat makan sehari tiga kali dan hidup dengan aman, tertib dan cinta damai.

Dia mengapresiasi niat Komisi X DPR untuk membantu memasarkan hasil kerajinan masyarakat Baduy dan dia berharap dengan pemasaran yang lebih baik, pengrajin Baduy dapat lebih meningkatkan kehidupannya.

Hoeriyah, perajin Baduy Luar warga Kadu Ketug, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, mengaku dirinya memproduksi kain dan sarung menggunakan alat tradisional selama sepekan bisa diselesaikan dengan ukuran 1,5 x 2 meter.

“Kami menjual kain dan sarung antara Rp50.000 sampai Rp300.000. Itu juga tergantung kualitasnya,” katanya. Ia mengaku selama ini seringkali mendapat pembinaan dan bantuan alat-alat produksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.

Pembinaan dan pelatihan itu, kata dia, tentu dapat meningkatkan kualitas produksi. “Kami bisa mengembangkan usaha kerajinan ini, berkat binaan pemerintah daerah, namun pemasaran masih kesulitan,” katanya. (tt)foto:tt



Kerajinan tenun Baduy di Desa Kanekes, kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak, Banten

Komisi VII DPR RI Minta Pengusaha Tambang Kalbar Taati UU Minerba

“Itu merupakan suatu keharusan yang harus ditaati oleh pengusaha tambang mineral,” terang Asfihani Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat saat pertemuan dengan beberapa pengusaha tambang di Pontianak, beberapa waktu lalu.

Yang menjadi masalah menurut Asfihani, adalah bagaimana pemerintah memberikan semacam intensif kepada pemilik usaha tambang itu dalam rangka menuju tahun 2014.

“Artinya mulai dari sekarang pemerintah harus mensosialisasikan kepada para pemilik tambang agar melakukan minimal sudah memiliki perencanaan yang jelas pada tahun 2014 itu sudah ada membangun pabrik smelter,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.

Pembangunan smelter merupakan perwujudan dari UU Minerba, yang menetapkan bahwa pengolahan dan pemurnian bahan tambang harus dilakukan di Indonesia. Smelter merupakan pabrik pengolahan atau pemurnian konsentrat dan bijih tambang. “Dengan adanya Undang-undang ini, untuk ke depan sudah tidak memungkinkan bagi kita untuk mengekspor raw materials”, jelasnya.

Untuk mengakomodir daripada pengusaha tambang yang memiliki lahan kecil, Asfihani minta agar pemerintah memikirkan hal tersebut. “Bagaimana solusinya sehingga kebijakan perintah amanat UU Minerba itu harus kita laksanakan,” imbuhnya.

Amanah UU Minerba tidak mengharuskan setiap pengusaha tambang untuk membangun smelter-nya, namun jika dari segi perekonomiannya pemilik tambang tersebut tidak ekonomis, dia bisa bekerja sama dengan pihak ketiga yang ingin menginvestasikan pembangunan smelter itu untuk bisa diolah dari bahan pemilik-pemilik tambang yang kecil.

Amanah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), bahwa setiap kegiatan mineral tahun 2014 nanti tidak boleh lagi di ekspor ke luar negeri dalam bentuk konsentrat.



Anggota Tim Kunker Komisi VII ke Provinsi Kalimantan Barat, Asfihani



“Komisi VII DPR RI juga menghimbau kepada pengusaha tambang, tentunya dalam pelaksanaan pasca tambang ataupun dalam rangka pengelolaan tambang itu aspek lingkungan harus diperhatikan,” tegas Asfihani.

Karena berkaitan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlin-

dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada semacam punishment kepada suatu kegiatan yang merusak lingkungan. “Ini bisa mengakibatkan sampai ijin dicabut dan sebagainya bagi pengusaha-pengusaha yang melanggar aturan dari UU lingkungan tersebut,” paparnya mengakhiri. (sc) foto:sc/parle

Komisi Pendidikan Kagumi SMA Cahaya Madani Banten

Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi pendidikan sangat mengagumi SMA Cahaya Madani Banten Boarding School yang termasuk dalam Rintisan Sekolah Berstandart Internasional (RSBI). Sekolah tersebut diakui baik mutunya dan sangat tepat jika sekolah tersebut dikategorikan RSBI.



Komisi X DPR saat mengunjungi SMA Cahaya Madani di Banten

Kekaguman ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar saat memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Banten, Selasa (26/7) yang salah satunya mengunjungi SMA Cahaya Madani Banten Boarding School yang berlokasi di Pandeglang, Banten.

Rully mengatakan, ditengah-tengah keprihatinan yang mendalam melihat banyaknya bangunan sekolah yang rusak di Provinsi Banten, begitu berkunjung ke SMA ini, ada harapan besar bahwa Banten ternyata juga memiliki sekolah unggulan yang sangat berkualitas.

“Di tengah-tengah ketertinggalan Banten, saya sangat surprise dan bangga dengan sekolah ini,” kata Rully dengan sangat antusias.

Rully menambahkan, banyak rumor yang berkembang saat ini bahwa RSBI tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Sebutan RSBI itu seringkali tidak disertai dengan peningkatan mutu yang baik sehingga sekolah tersebut tak ubahnya sama dengan sekolah-sekolah lainnya.

Untuk itulah, Komisi X DPR perlu

melakukan pengawasan terhadap munculnya RSBI-RSBI. Karena, katanya, banyak juga RSBI itu ada hanya ingin mengambil dana-dana untuk kepentingan sekolahnya.

Melihat langsung potensi yang dimiliki siswa siswi di sekolah ini tak diragukan lagi sekolah ini memang memiliki kualitas bertaraf in-

ternasional. Apalagi seperti dikatakan Kepala Sekolah SMA ini bahwa setiap tahunnya siswa siswinya dapat masuk 100 persen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Ini juga menjadi ukuran bahwa sekolah ini mempunyai mutu yang baik,” tambah Rully.

Dia menambahkan, kalau Banten memiliki sekolah dengan model seperti ini, nantinya Banten tidak akan khawatir lagi dalam segi SDM, karena Banten memiliki SDM yang berkualitas untuk membangun daerahnya. “Anak-anak ini diharapkan menjadi calon pemimpin Banten yang akan datang,” katanya.

Apalagi melihat kondisi Banten sekarang dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) 18 %, di bawah APK nasional, tentunya Banten harus bekerja keras untuk meningkatkan APKnya di atas APK nasional.

Rully juga berharap SMA Cahaya Madani ini dapat meningkatkan prestasinya di tingkat nasional dan menjadi salah satu RSBI unggulan di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, beberapa siswa menampilkan kehebatan-

nya berpidato di depan rombongan Komisi X DPR dengan berbahasa Indonesia, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Melihat penampilan mereka berpidato, anak-anak tersebut memang sangat fasih dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi.

Kepala Sekolah SMA Cahaya Madani Banten Boarding School, Adin Wahyudin menyampaikan bahwa siswa siswi yang masuk di SMA ini merupakan wakil-wakil lulusan terbaik dari seluruh kabupaten di Provinsi Banten.

Siswa siswi ini masuk dengan seleksi yang sangat ketat dan transparan. Setiap tahun sekolah ini hanya menerima murid 80 orang. Anak-anak ini tinggal di asrama sekolah sehingga dapat lebih fokus belajar.

Menurut Adin, sekolah ini menggunakan tiga bahasa pengantar yaitu bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.

Angkatan ke tiga dan ke empat lulusan SMA ini 100 persen diterima di Perguruan Tinggi Negeri, dengan pilihan fakultas yang favorit.

SMA Madani, kata Adin, juga telah banyak memperoleh prestasi dalam berbagai lomba baik di tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat nasional.

Pihaknya berangan-angan untuk membawa sekolah ini ke tingkat nasional dan diperkenalkan sebagai sekolah yang memiliki IT dan program aplikasi sekolah yang dapat dibanggakan. Dia juga selalu berharap siswa siswi ini menjadi manusia yang mampu mewakili Indonesia di kancah internasional.

Tentunya, kata Adin, untuk mewujudkan semua itu, dukungan moril dan materiil dari berbagai pihak terkait sangat diharapkan untuk menjadikan SMA Madani lebih berprestasi lagi. (tt)foto:tt

Komisi I DPR Meminta Agar Kewaspadaan Di Daerah Lebih Ditingkatkan

Demikian yang dikatakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik pada saat pertemuan dengan Gubernur Riau M Rusli Zainal di ruang kantor Gubernur, Senin (25/7) siang

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik juga menambahkan, karena posisi inilah yang semakin meningkat dan semakin maju perkembangan ekonomi di propinsi Riau, berarti potensi-potensi ancamannya juga semakin menguat, pertama itu akan menjadi karakter suatu daerah yang maju secara ekonomi akan mengundang mobilitas manusia baik berbagai daerah dan itu akan menciptakan kerawana tersendiri, ungkap Mahfudz Sidik.

Mahfudz Sidik juga mengatakan bahwa, bisa saja potensi-potensi yang muncul karena persoalan dengan pihak eksternal, karena walau bagaimanapun Singapura, Malaysia, memastikan tidak ingin melihat Propinsi Riau ini sebagai kompetitor ekonomi yang mengganggu kepentingan-kepentingan mereka, kata Ketua Komisi I DPR.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik juga mengemukakan, bahwa persaingan ini bisa saja berujung kepada peningkatan potensi ancaman nah ini yang harus kita cermati sama-sama sehingga Pemerintah Riau selain terus mendorong pembangunan ekonomi tapi perlu juga mengantisipasi bagaimana peningkatan ancaman daerah ini, tegas Mahfudz.

Dikatakan juga bahwa antisipasi tersebut Pemerintah Daerah secara terus menerus melakukan pemetaan terhadap dinamika perubahan dan bekerjasama dengan pihak intelijen daerah dan ini yang harus diefektifkan betul.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik juga menekankan bahwa, bukan saja intelijen dibidang sector keamanan saja tetapi juga di bidang ekonomi luar negeri juga harus dicermati secara sungguh-sungguh, mengingatkan ma-

Propinsi Riau merupakan salah satu kutub kekuatan ekonomi di Indonesia bagian barat yang sangat strategis, maka kewaspadaan harus ditingkatkan dan dipertahankan, mengingat Propinsi Riau ini berbatasan langsung dengan dua negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia, juga berhadapan langsung dengan jalur lalulintas perdagangan laut dunia.

salah ini penanganan juga harus secara sistemik, karena hal ini termasuk merupakan kebijakan-kebijakan dan politik pemerintah pusat, karena menyangkut wilayah tetangga sehingga koordinasi antara pusat dengan daerah juga jadi sangat penting.

Sementara itu Gubernur Riau M Rusli Zainal mengatakan bahwa, mudah-mudahan kunjungan Komisi I DPR ke Propinsi Riau ini dapat mendorong dan mempertahankan percepatan ekonomi daerah dapat dipertahankan

di pemerintahan Propinsi Riau ini.

Gubernur Riau M Rusli Zainal berharap agar Komisi I DPR dapat mendukung secara penuh terhadap kebijakan-kebijak pemerintah Riau mengingat kunjungan Komisi I DPR ini masih beberapa hari lagi dan kunjungan Kerja Komisi I DPR ini berkaitan langsung dengan tupoksi-tupoksi tugas komisi I DPR kami berharap mudah-mudahan ini dapat dukungan daripada kebijakan-kebijakan ini, ungkap Zainal.(Spy).foto:spy



Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddik menerima cinderamatta dari Pemerintah Daerah Riau

DPR RI Apresiasi Fasilitas SMK 3in1 di Banda Aceh

Pujian dan apresiasi meluncur dari hampir semua anggota Tim Kunker Komisi X DPR RI usai meninjau kompleks pendidikan yang terdiri dari gabungan 3 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dengan jurusan berbeda di Lhoong Raya, Banda Aceh.



Tim Kunker komisi X DPR meninjau kompleks pendidikan SMK di Lhoong Raya, Banda Aceh

Sekolah yang dibangun pasca tsunami dengan dukungan pemerintah Federal Jerman ini memiliki fasilitas lengkap, mulai dari gedung sampai dengan sarana prasarana pendukung lainnya.

“Kita mengunjungi beberapa sekolah selama di Aceh dan SMK 1, 2, 3 itu luar biasa. Kalau kita lihat gedung dan kelengkapannya, SMK di Pulau Jawa saja lewat. Kita dorong semua betul-betul berfungsi,” kata Ketua Tim Kunker Atut Adianto dalam pertemuan dengan jajaran Dinas Pendidikan NAD, di Banda Aceh, Rabu (27/7). Ia menambahkan sekolah yang dikunjungi seperti SMAN 4, SMA boarding Fajar Harapan, SMP 19 dan SDN 67 dinilainya baik dan berhasil menjadi percontohan.

Anggota Komisi X Hetifah juga menyampaikan pendapat senada. “Saya hari ini mendapatkan kesan yang luar biasa, walaupun ada beberapa informasi yang harus didalami. Namun secara umum hampir semua sekolah luar

biasa, baik kualitas fisik, metode maupun guru-gurunya,” kata politisi Partai Golkar ini. Namun ia menyayangkan hanya berkesempatan meninjau sekolah yang masuk kategori percontohan yang bisa dipastikan mendapat fasilitas lebih baik dari pemerintah. “Sayangnya kami tidak memperoleh kesempatan untuk membandingkan kondisi di kabupaten lain.”

Lebih jauh ia mengkhawatirkan telah terjadi disparitas kualitas pendidikan di Aceh baik antar sekolah maupun antar daerah. Indikasinya bisa dilihat dari hasil UN tingkat SMA pada tahun 2011 ini, provinsi NAD ternyata berada pada posisi 5 dari 7 propinsi terburuk tingkat kelulusan siswa. Bahkan ada satu sekolah di kabupaten Simeulue seluruh siswa dinyatakan tidak lulus UN. Fakta ini berbanding terbalik dengan keberhasilan SMA percontohan Fajar Harapan yang siswanya berhasil meraih nilai UN tertinggi secara nasional. “Apa strategi pemerintah

provinsi mengurangi kesenjangan antar daerah?” tanya Hetifah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, Zulkifli Saidi menjelaskan SMK 3 in 1 dibangun pasca tsunami 2004 yang telah memporak-porandakan banyak sekolah di Banda Aceh. Pemerintah Jerman membantu pembangunan kembali tiga SMK yang disatukan pada satu kompleks di lokasi baru di Gampong Lhoong Raya, kecamatan Banda Raya, Banda Aceh.

Sekolah ditata dengan standar internasional, perlengkapan belajar mengajar seperti alat peraga, buku, alat perbengkelan, dan kebutuhan siswa lainnya didatangkan dari negara yang dikenal memiliki sistem pendidikan kejuruan terbaik di dunia ini. Untuk meningkatkan kapasitas, para guru juga diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan di Jerman dan di beberapa negara lain.

Salah satu tantangan pengembangan pendidikan di daerah saat ini adalah penerapan otonomi yang salah kaprah. Zulkifli menambahkan Dinas Pendidikan di tingkat provinsi tidak dapat optimal dalam melakukan koordinasi dengan dinas di Kabupaten dan Kota. “Dengan penerapan otonomi maka Kepala Dinas kabupaten dan kota bukan bawahan dari Kepala Dinas propinsi, guru di kabupaten kota adalah bawahan bupati dan walikota. Sehingga banyak hal yang kita lakukan, termasuk agenda nasional terganggu dengan otonomi ini,” tandasnya.

Ia memberi contoh kasus gagalnya seluruh siswa SMA Simeuleu dalam ujian nasional tahun ini. Tudingan mengarah pada kebijakan Dinas di tingkat provinsi, namun faktanya seluruh kendali terhadap sekolah mulai dari pengangkatan guru sampai kepala sekolah berada di tingkat kabupaten. Ia meminta kondisi ini hendaknya menjadi perhatian anggota Komisi X DPR RI. Menurutnya otonomi pada dunia pendidikan sejauh ini sama sekali tidak efektif.

Apresiasi untuk Perpustakaan Aceh

Salah satu gedung yang rusak parah dan tidak dapat digunakan pasca tsunami adalah Perpustakaan dan Arsip Aceh. Hampir seluruh koleksi, rak buku, meja dan kursi baca, serta jaringan LAN hancur total. Perpustakaan tidak dapat melayani publik selama beberapa bulan dan baru dibuka kembali pada bulan

Mei 2005.

Dalam kunjungan Tim Kunker ke Perpustakaan yang terletak di Jalan Tjut Nyak Arief, Banda Aceh ini hampir semua memberikan apresiasi. “Saya semula underestimate karena pada kunjungan ke 6 perpustakaan di daerah lain semua mengecewakan. Baru kali ini kami melihat pustaka yang memenuhi harapan kami. Penataan dan jumlah pengunjung yang datang cukup

tinggi,” kata anggota Komisi X, Oelfah AS. Harmanto.

Ia menyatakan siap mendukung upaya peningkatan kapasitas perpustakaan yang saat ini sedang diajukan kepada pemerintah. “Kami harap proposal yang telah disampaikan kepada menteri PPN/Kepala Bappenas dapat disampaikan tembusannya kepada Komisi X. Kita dalam posisi siap mengawal usulan tersebut,” demikian Oelfah. (iky) foto:iky/parle

Komisi I DPR Menemukan Persoalan Perumahan Prajurit Yang Memprihatinkan

Demikian yang dikatakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik pada saat melakukan peninjauan ke Korem 031 Wirabima, Kamis (28/7) siang.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik menambahkan, bahwa Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perumahan Rakyat diharapkan dapat segera mensinkronisasikan program perumahan untuk prajurit, walaupun sama-sama PNS tapi kondisi prajurit TNI ini berbeda, terutama dalam hal kesejahteraan perumahan, kata Mahfudz.

Mahfudz Sidik juga mengemukakan bahwa prajurit TNI itu harus siap 24 jam dan untuk efektivitas dengan keadaan saat ini saya rasa tidak bisa karena posisi mereka tersebar dan tidak terkonsentrasi di satu tempat, padahal mereka sama sekali tidak boleh disibukan dengan hal-hal sepele misalnya makan dan tempat tinggal, ujar mahfudz Sidik.

Berdasarkan hal tersebut, Mahfudz juga meminta Kementerian Pertahanan dan kementerian Perumahan bisa mensinergikan program-program perumahan bagi prajurit TNI, dan setelah reses ini Komisi I DPR akan koordinasikan masalah hal ini. Kalau masalah uang lauk pauk kan sudah ada anggaran dan tinggal disalurkan saja, kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik.

Tim Kunker Komisi I DPR juga akan melakukan pertemuan dengan Pangdam I/Bukit Barisan dengan dihadiri Danrem 031 Wira Bima, Danlanal Du-

ma Pekanbaru dengan penjelasan tentang peran Kodam I/Bukit Barisan di wilayah dalam mendukung pembangunan di daerah, serta penjelasan tentang peran Lanal dalam mendukung pengamanan wilayah laut sektor barat dan kesiapan mendukung MEF Matra Laut.

Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011 Komisi I DPR yang membidangi Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri dan Informasi telah melakukan Kunjungan Kerja ke Propinsi Riau, dalam kunjungan tersebut antara lain ke Korem 031 Wirabima, Lanal Dumai, serta ke Lanud, disana Komisi I DPR menemukan persoalan-persoalan perumahan prajurit TNI yang memprihatinkan.



Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidik

mai Pekanbaru dengan penjelasan tentang peran Kodam I/Bukit Barisan di wilayah dalam mendukung pembangunan di daerah, serta penjelasan tentang peran Lanal dalam mendukung pengamanan wilayah laut sektor barat dan kesiapan mendukung MEF Matra Laut.

Selanjutnya Tim Kunker Komisi I DPR melakukan pertemuan dengan Danlanud Pekanbaru dengan penjelasan kemampuan Lanud dengan kekua-

tannya dalam menjaga, mengamankan wilayah udara nasional sektor barat dari berbagai hakekat ancaman, kemudian dilanjutkan peninjauan kelengkapan melihat langsung Pesawat Hawk MK-53, kemudian melanjutkan pertemuan dengan Dan Yon Arhanudse 13/Pariga Bhuana Yudha Pekanbaru dengan penjelasan efektifitas alusista hanud dalam mamayungi wilayah dari serangan udara aktif pihak lawan. (Spy).foto:spy

Kelangkaan BBM di Kabupaten Ketapang Akibat Disparitas Harga Tinggi

Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI (Tim Kunker) ke Provinsi Kalimantan Barat Dito Ganinduto menyatakan salah satu penyebab kelangkaan BBM di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat adalah akibat adanya disparitas harga yang tinggi sehingga memicu terjadinya penyelewengan.



Anggota Tim Kunker komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat, Dito Ganinduto

Hal tersebut disampaikan Anggota Tim Kunker Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar saat menyaksikan antrean panjang masyarakat Ketapang di setiap SPBU akibat berlanjutnya kelangkaan BBM di Kabupaten Ketapang, beberapa waktu lalu.

“Selama disparitas harga masih tinggi maka akan terus terjadi penyelewengan,” kata Dito. Menurutnya dengan hadirnya penyelewengan maka masyarakat akan terus kekurangan

BBM dan antrean akan terus terjadi.

Hal senada juga diungkapkan Anggota BPH Migas Ibrahim Hasyim yang ikut dalam rombongan Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Ibrahim kelangkaan BBM di Ketapang memang sudah sangat memprihatinkan. “Ada dua permasalahan yang mengakibatkan langkanya BBM yaitu pertama kurangnya kuota pasokan dan kedua selama ada daerah pertambangan, maka akan terjadi kekurangan BBM,” terangnya.

Dijelaskan Ibrahim bahwa ada indikasi BBM bersubsidi juga diambil oleh pertambangan ilegal. “Untuk masalah kuota, saat ini sudah ditambah, dan nantinya akan kita bagi setiap kabupaten, tapi untuk Kalbar, kuota premium sudah kelebihan 6 persen, begitu juga dengan solar juga sudah over 6 persen,” jelas Ibrahim.

Ia menegaskan, jika masalah pertambangan ilegal tidak segera diselesaikan, maka adanya kelangkaan BBM akan terus berkepanjangan.

Tentang adanya indikasi penimbunan BBM serta penggunaan BBM bersubsidi di pertambangan ilegal, Ibrahim berjanji pihaknya akan menurunkan PPNS untuk melacak dan melakukan investigasi. “Untuk penyelesaian masalah BBM, selain diperlukan penambahan kuota juga perlu investigasi penyalahgunaan BBM di Kabupaten Ketapang,” imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang Cipriana Lestari memaparkan, masalah antrean BBM di kabupaten Ketapang sudah berlangsung lebih dari enam bulan. “Kelangkaan ini, dipicu adanya pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Ketapang yang mengalami kenaikan sebesar 30 persen, yang tidakimbang dengan penambahan kuota BBM,” katanya.

Lestari mengaku saat ini dalam satu bulan terdapat penambahan kendaraan bermotor roda dua sebanyak dua ribu sedangkan kendaraan roda empat 98 kendaraan.

Berdasarkan data yang diperolehnya dari tim pengawasan yang ditempatkan di SPBU, terdapat sebanyak 40 persen pelangsi yang melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang-ulang di sejumlah SBPU. “Menurut laporan dan data yang kami terima, ada yang sampai melakukan pengisian BBM sebanyak 11 kali di SPBU,” ungkapnya. (sc) foto:sc

RUU PT Akan Menjawab Permasalahan Perguruan Tinggi

Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Banten, Senin lalu, menjawab keinginan Pemerintah Daerah Banten ingin memiliki Kopertis di wilayahnya sendiri.

Dalam kunjungan kerja yang dipimpinnya itu, Rully mengatakan, RUU tentang Pendidikan Tinggi ini masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2011 yang merupakan usul inisiatif DPR RI.

Menurut Rully RUU Pendidikan Tinggi ini mendesak untuk segera dibahas, karena RUU ini bertujuan ingin membenahi Pendidikan Tinggi kita. “RUU ini nantinya akan menjawab permasalahan di perguruan tinggi kita,” katanya.

RUU ini juga akan menjawab keinginan Pemerintah Provinsi Banten tentang keinginannya memiliki Kopertis sendiri, tidak bergabung dengan Kopertis wilayah Jawa Barat. Karena RUU ini nantinya akan mengatur tentang Lembaga Penjaminan mutu Pendidikan (LPMP) yang akan ada di tiap-tiap provinsi.

Untuk itu, Rully sangat berharap masukan-masukan berharga dari kalangan akademisi di Banten dan stakeholders lainnya yang terkait dengan RUU ini guna penyempurnaan RUU dimaksud.

“Mumpung sekarang baru dibahas, saya rasa belum terlambat para pemangku kepentingan di Banten dapat memberikan masukan-masukan penting terkait RUU ini,” tambahnya.

Rully mengatakan, RUU ini nantinya juga akan mengatur pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat. Mengingat keluhan yang dirasakan masyarakat sekarang ini pendidikan tinggi dirasakan semakin sulit terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Jumlah lulusan perguruan tinggi kita hanya kurang dari lima persen. Dari 1,5 juta lulusan SMA tiap tahun, hanya 500.000 siswa yang melanjut-

Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar mengatakan, Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sekarang sedang dibahas DPR diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan Perguruan Tinggi di tanah air.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Rully Chairul Azwar (tengah)

kan kuliah dan sisanya satu juta siswa tidak melanjutkan kuliah dengan berbagai alasan.

Sementara dari 500 ribu siswa tadi, yang diterima di universitas negeri hanya kurang lebih 100 ribu saja dan sisanya masuk di berbagai perguruan tinggi swasta atau melanjutkan kuliah di luar negeri.

“Inilah potret pendidikan kita dan kondisi ini tentunya menjadi PR kita bersama,” kata Rully.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Banten Masduki

mengatakan, sejak Banten menjadi provinsi sendiri, urusan Kopertis masih harus bergabung dengan Kopertis Provinsi Jawa Barat dan ini menyulitkan bagi orang yang ingin berurusan dengan Kopertis.

Untuk itu dia mengusulkan Kopertis Jawa Barat dipecah menjadi dua Kopertis, Kopertis Jawa Barat dan Kopertis Banten, sehingga akan lebih memudahkan masyarakat Banten yang akan berurusan dengan Kopertis.

(tt) foto: tt

Komisi VII Terima Menteri Energi Australia



Komisi VII DPR RI saat menerima kunjungan Menteri Energi Australia Martin Ferguson di ruang Rapat Pimpinan DPR RI

Komisi VII DPR RI yang diwakili Teuku Riefky Harsya (F-PD), Zainudin Amali (F-PG), Halim Kalla (F-PG), Bobby Adhityo Rizaldi (F-PG), S. Milton Pakpahan (F-PD), Heriyanto (F-PD), Sugihono Karyosuwondo, (F-PKS), Ahmad Rilyadi (F-PKS), Nur Yasin (F-PKB), Alimin Abdullah (F-PAN), Dewi Aryani Hilman (F-PDIP), Iqbal Alan Abdullah (F-Hanura), Dhohir Farisi (F-Gerindra), menerima kunjungan Menteri Energi Australia Martin Ferguson, Ruang Rapat Pimpinan, Rabu (3/8).

Maksud kedatangan Menteri Energi Australia adalah untuk menanyakan peluang-peluang investasi yang ada di Indonesia. Sebelumnya mereka telah bertemu dengan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono untuk membahas hal yang sama.

Menurut Teuku Riefky sebagai pimpinan pertemuan siang ini, ia menjelaskan pertemuan seperti ini sangat penting karena Australia merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dalam pengelolaan energi dan

pertambangan.

“Sejumlah perusahaan asal Australia telah beroperasi di Indonesia, dan kami mengetahui bahwa sejumlah perusahaan di Australia berniat untuk berinvestasi di Indonesia, tentu kami sangat mengharapkan peningkatan investasi perusahaan-perusahaan asal Australia di Indonesia, termasuk di sektor energi dan pertambangan,” jelasnya.

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia di sektor energi hingga saat ini adalah tingkat pertumbuhan konsumsi energi yang belum dapat diimbangi secara proporsional oleh kemampuan supply, termasuk di dalam penyediaan jaringan infrastruktur pendistribusian energi di dalam negeri yang masih terbatas.

“Sebagai respon untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, saat ini Komisi VII bersama pemerintah sedang melakukan pembahasan Kebijakan Energi Nasional yang baru, kebijakan tersebut bertu-

juan untuk mengoptimalkan pengelolaan energi dan ketahanan energi. Termasuk didalamnya peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti tenaga air, panas bumi dan bio energy,” kata Teuku Riefky.

Melihat peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia, Martin Ferguson mengatakan, akan mempelajari kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia, dan akan mulai mengajak perusahaan-perusahaan dan industri-industri Australia untuk berinvestasi di Indonesia.

Pada akhir pertemuan, Milton Pakpahan memberikan tips kepada pihak Australia jika akan berinvestasi di Indonesia, mereka harus memperhatikan poin-poin yang harus dilakukan jika ingin berinvestasi di Indonesia agar berjalan dengan lancar. “Ada 3 poin yang sebaiknya diperhatikan jika akan berinvestasi di Indonesia, Corporate Social Responsibility, menghargai kebudayaan Indonesia dan Environment Friendly. (ra) foto:ra

Pendapat Marzuki Soal KPK Wajar dan Sah Saja

“ Dalam kerangka demokrasi wajar dan sah seorang tokoh nasional menyampaikan pandangannya betatapun menuai kontroversi, karena itu saya minta masyarakat meletakkan persoalannya seperti itu,” jelas Priyo saat menerima calon hakim Agung tahun 2011, di Gedung Nusantara III, Senin, (1/7).

Ketua DPR Marzuki Alie, terang Priyo, sebagai tokoh nasional dan pimpinan PD memiliki hak penuh untuk menyampaikannya pendapatnya tentang KPK, meskipun dirinya mengaku tidak sependapat terhadap pernyataan Marzuki Alie. “Saya lebih setuju kalau KPK perlu mengadakan pembenahan yang bersifat total pasalnya, KPK yang kita cintai itu berada pada titik nadir dalam sejarah KPK karena banyak kasus besar menyedot perhatian publik justru KPK terkesan angin-anginan,” terangnya, seperti Skandal Century ketika ditanya mengenai perkembangan kasusnya masih belum ada yang bisa dibanggakan, bahkan tim Century berkesan belum maksimal.

Selain itu masalah kasus suap travel check BI, lanjut Priyo, sampai hari ini KPK gagal menunjukkan kedigdayaan sebagai lembaga hukum yang adil karena masih belum bisa menangkap Nunung. “Karena itu pembenahan total di tubuh KPK merupakan perspektif yang harus dikedepankan, saya merasa sedih KPK terlemahkan oleh pendekar utamanya. banyak tokoh KPK yang kita pilih selalu berulang-ulang disebut dalam kasus yang dituduh,” terangnya.

Priyo menambahkan, dengan melakukan pembenahan secara total maka pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie akan terlegitimasi pada saatnya nanti. Karena itu tidak perlu pernyataan Marzuki dikecam beramai-ramai bahkan sampai diajukan ke BK. artinya, pandangan itu sah dan dijamin oleh UU

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menganggap pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie sebagai tokoh nasional wajar dan sah saja di era demokrasi saat ini.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso

tidak bisa direcall dan digeser akibat pandangan yang disampaikan.

“Dilaporkan ke-BK itu sudah terlalu jauh, kita abaikan itu lebih baik karena memang kita mempunyai pendapat berbeda karena itu saya sarankan kita menghormati pendapatnya,” jelasnya.

Mengenai usulan koruptor dimaafkan, tambah Priyo, ini merupakan

saatnya kita bersih-bersih berbenah di semua lini. “Parpol, DPR RI, lembaga pemerintahan, kepolisian, MA, jaksa agung termasuk masyarakat sipil melakukan pembenahan bahkan LSM disampaikan kepada publik dari siapa saja dana yang mereka peroleh,” tambahnya. (si/nt) foto:ry



jaga hati

Marhaban ya Ramadhan
bulan suci penuh baroqah
penuh ampunan Illahi

Perbanyaklah amalan ibadah
perbanyaklah berbuat kebajikan
perbanyaklah memohon ampunan Allah SWT

Saatnya kita semua beristiqhfar
saatnya kita belajar bersabar
saatnya kita bercermin diri

Bulan suci ramadhan memberi ruang
untuk kita mengintropeksi diri kita sendiri.
Intropeksi akan kesalahan dan dosa
yang pernah kita buat, intropeksi akan segala
prilaku yang telah kita lakukan selama ini.

Mumpung kita masih diberi waktu
mumpung diri ini masih diberi kesempatan
oleh Allah untuk menata diri ini.

Yang telah mati tidak akan kembali,
yang telah mati tidak akan ada kesempatan lagi,
hidup kita cuma sekali,
perbaiki diri dibulan suci ini,
atau kita akan menyesali diri
karna belum tentu kita
bertemu bulan suci ramadhan
di tahun depan nanti.

